

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia Hari Raya Idul Fitri bukan saja merupakan perayaan keagamaan tetapi sudah berkembang menjadi suatu kebiasaan atau tradisi umat muslim di Indonesia. Umat muslim biasanya merayakannya di kampung halaman untuk bersilaturahmi dengan sanak saudaranya . Aktivitas yang secara bersamaan ini berpengaruh pada mobilitas yang tinggi menjelang ,pada saat dan sesudah lebaran . Peningkatan mobilitas orang dan barang tersebut menjadi masalah pada kondisi lalu lintas kendaraan yang meningkat pada saat yang bersamaan yang mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan di jalan. Setiap tahun pada saat menjelang dan sesudah lebaran selalu terjadi kemacetan dan kecelakaan yang tinggi. Menurut EE Mangindaan ada empat masalah arus lalu lintas jelang lebaran seperti yang disampaikan dalam Tribune (2013):” Masalah pertama , penggunaan jalan nasional yang tidak benar antara lain imbas dari pasar tumpah, lokasi wisata atau perlintasan sebidang antara jalan dan jalan rel di jalur utama dan jalur alternatif. Masalah kedua , peningkatan penggunaan sepeda motor dan mobil pribadi yang akan berdampak pula pada peningkatan kerawanan kecelakaan. Masalah ke tiga, Ketertiban dan kelancaran pelayanan masuk penumpang di terminal . Masalah ketiga Pengaturan dan pengawasan kegiatan mudik angkutan laut dan ASDP. Masalah ke empat ” Hal yang sama disampaikan Geotimes (2015) permasalahan saat Idul Fitri antara lain : ”masalah pertama adalah kemacetan yang terjadi tiap tahun, kemacetan menjadi hal yang biasa

secara berulang yang ditemui saat mudik , jutaan kendaraan pribadi saling bertemu dan melintasi jalan yang sama . Masalah yang kedua adalah kecelakaan.” Pada tahun 2015 selama operasi kepolisian pengamanan Lebaran (16 hari) terjadi kecelakaan sebanyak 9.309 kecelakaan yang terdiri dari kecelakaan roda dua (sepeda motor) selama pelaksanaan operasi pengamanan lebaran sebanyak 6.052 kejadian sedangkan kecelakaan roda empat sebanyak 3.257 kejadian. Selain itu pada tahun 2016 masih terjadi tingginya kecelakaan dan kemacetan dimana keadaan ini menjadi keluhan masyarakat salah satu keluhan tersebut adalah seperti yang disampaikan Wahyu Budi Santoso dalam koran Sindo tanggal 15 Juli 2016 yang menyampaikan bahwa ” kurangnya sinergi dari pihak pihak yang berkepentingan yakni Kepolisian, Dephub, Departemen Pekerjaan Umum, dan Depkes membuat arus mudik Lebaran 2016 horor dan memakan korban hingga belasan orang. Kasus Brexit bukti nyata kepolisian gagal dalam memberikan pelayanan arus mudik. Pemerintah tak mampu antisipasi dan hal ini membuktikan pelayanan Polri yang buruk . Kemacetan yang parah yang terjadi di pintu tol Brebes Timur selama arus mudik lebaran terjadi karena kurangnya koordinasi dan sinergitas dengan internal kepolisian”. Menurut Ketua Komisi V DPR Fary D. Francis seperti yang dimuat Media Indonesia 25 Agustus 2016 menyampaikan :” Fary mendesak pemerintah untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor , juga melakukan evaluasi yang lebih terperinci dan komprehensif terhadap penanganan arus mudik dan arus balik.”

Bila mencermati pendapat diatas tentang koordinasi dan sinergitas yang menjadi penyebab, terlihat bahwa ada penilaian bahwa para personel yang bertugas dalam organisasi satgas operasi kepolisian pengamanan Lebaran

menghadapi kendala. Koordinasi didalam suatu organisasi tentunya sudah dibuat saat awal proses pembuatan kebijakan berupa hubungan tata cara kerja dalam operasi kepolisian tersebut. Disisi lain berdasarkan jumlah kejadian kecelakaan yang tinggi dan kemacetan yang terus menerus dan permasalahan lain pada saat operasi pengamanan Lebaran perlu dikaji juga perlu diadakan penelitian .

Polri tiap tahun melaksanakan operasi pengamanan Lebaran tetapi masyarakat melihat bahwa kecelakaan yang ada masih tinggi. Untuk itu perlu diteliti melalui suatu evaluasi bagaimana proses kebijakan dibuat sehingga bisa diketahui permasalahannya untuk dicarikan pemecahan guna memberikan masukan kebijakan di masa mendatang.

Permasalahan yang ada seperti kemacetan disebabkan jumlah jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan pribadi yang menggunakan jalan secara bersamaan, atau permasalahan ketidak tertiban dalam berlalu lintas yang menyebabkan kecelakaan , sudah sering kita lihat di media massa.

Kondisi tersebut perlu dilihat dari sisi lain yakni bagaimana kebijakan tersebut dibuat melalui suatu penelitian evaluasi kebijakan agar bisa ditemukan permasalahan yang ada dan juga bisa mengetahui kinerja operasi kepolisian pengamanan Lebaran.

Semenjak reformasi digulirkan pada tahun 1998, keinginan akan peningkatan kinerja instansi pemerintah menjadi tuntutan masyarakat, dimana masyarakat menganggap bahwa kinerja pemerintah masih rendah dan tidak transparan. Pertanggungjawaban Instansi pemerintah berupa pertanggung jawaban hasil kerja dalam bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik kepada masyarakat maupun kepada instansi ditingkat atasnya masih dirasakan kurang

sekali. Masyarakat selalu menuntut kinerja yang baik karena uang yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat harus ditunjukkan melalui kinerja.

Keluhan masyarakat akan rendahnya kinerja instansi pemerintah sering diungkapkan dengan ungkapan-ungkapan bahwa pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik, mana hasilnya memberikan pelayanan pada masyarakat, pemerintah hanya pandai memerintah bukan kerja memberikan pelayanan, yang dikejar hanya kekuasaan semata dan ungkapan-ungkapan sejenis yang mewujudkan kritikan terhadap kinerja pemerintah.

Selaras dengan kondisi tersebut menurut Kumorotomo (2013:6-7) : “Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa kebijakan, program dan pelayanan publik kurang responsive terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan secara luas. Pertama, birokrat kebanyakan masih berorientasi kepada kekuasaan dan bukannya kepentingan publik atau pelayanan publik secara umum. Sebagian besar pejabat atau birokrat itu selama ini menempatkan dirinya dalam posisinya sebagai penguasa (authorities) dan masih sangat terbatas pejabat yang menyadari perannya sebagai penyedia layanan kepada masyarakat (public servant/service provider). Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dan apa yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat.”

Polri sebagai salah satu bagian dari institusi pemerintah perlu meningkatkan kinerjanya sebagai suatu upaya melakukan pembaharuan dan perubahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan kaidah akuntabilitas kinerja di instansi Pemerintah maupun publik. Salah

satu kebijakan Polri yang berkaitan dalam memberikan layanan kelancaran dan keamanan pada saat mudik lebaran adalah kebijakan Polri untuk melaksanakan Operasi Kepolisian Pengamanan Lebaran .

Bagi masyarakat Idul Fitri mempunyai kekhasan tersendiri selain perayaan keagamaan juga sudah berkembang menjadi tradisi sehingga perayaan Idul Fitri selalu disertai dengan aktivitas masyarakat baik saat mudik maupun balik. Kegiatan mudik dan balik yang terjadi saat menjelang, pada saat dan sesudah lebaran yang bertepatan pada hari libur nasional terutama yang menggunakan jalur perjalanan darat selalu membawa implikasi kemacetan yang luar biasa dan tingginya kecelakaan lalu lintas terutama di Pulau Jawa. Masyarakat menginginkan pada pelaksanaan lebaran perjalanannya baik saat berangkat maupun kembali ke tempat asal bisa berjalan lancar. Kenyataan yang ada tiap tahun pasti dijumpai kemacetan yang panjang dan menghabiskan waktu yang lama dan sering terjadi kecelakaan. Masyarakat merasa bahwa operasi pengamanan lebaran masih terjadi kemacetan sedangkan Polri menganggap layanan pengamanan lebaran yang diberikan kepada masyarakat tiap tahun dirasakan berhasil. Antara apa yang diinginkan masyarakat dan ukuran keberhasilan yang diberikan Polri dalam operasi pengamanan Lebaran dirasakan ada gap antara kenyataan yang terjadi di lapangan . Persepsi keberhasilan yang berbeda antara masyarakat dan Polri dalam pelaksanaan menilai kinerja kebijakan Operasi pengamanan Lebaran juga perlu dikaji lebih mendalam rangkaian penelitian ini yang berkaitan dengan ukuran kinerja operasi kepolisian pengamanan Lebaran. Perlu keterbukaan dengan masyarakat bagaimana ukuran kinerja itu akan dicapai oleh Polri seperti makin berkurangnya jumlah kecelakaan

, penurunan korban kecelakaan lalu lintas , kemacetan lalu lintas . Polri sebagai unsur pemerintah dituntut memberikan pelayanan secara transparan kepada masyarakat dan bagaimana ukuran kinerja keberhasilan operasi kepolisian pengamanan Lebaran itu ditetapkan . Diperlukan penelitian yang mendalam tentang kebijakan operasi kepolisian pengamanan Lebaran mulai proses pembuatan kebijakan sampai dengan kinerja yang dihasilkan operasi tersebut.

Menurut Ellwood dalam Sinambela (2012:100): Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Sejalan dengan tuntutan masyarakat tersebut sesuai dengan pendapat Ryaas Rasyid (1998: 139) : “Hakekat dibentuknya pemerintah adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri,tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama”.

Tuntutan adanya pemerintahan yang bersih dan memiliki keperpihakan kepada masyarakat merupakan suatu keharusan untuk dijalankan dan merupakan tuntutan masyarakat karena uang yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan adalah dari rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara benar dan transparan.

Menurut Hafied Cangara (2011: 131) : “Bagi negara negara yang menganut demokrasi,kebijakan yang diambil pemerintah untuk kepentingan umum, selalu memerhatikan suara dan kehendak rakyat. Oleh karena itu pendapat umum dan kebijakan publik memiliki hubungan yang sangat erat”.

Sedangkan menurut Ario Wicaksono dalam Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali (2010:55), Pasca reformasi dan demokrasi, birokrasi publik dituntut untuk mengorientasikan nilainya dan merevitalisasi perannya agar lebih sesuai dengan semangat paradigma administrasi publik yang lebih berorientasi pelayanan, baik pelayanan ke stakeholders internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Zaidan Nawawi (2013 : 184) : “Indonesia adalah salah satu contohnya, sejak zaman kolonial hingga sekarang perilaku birokrasi masih menempatkan dirinya sebagai tuan rumah yang harus dilayani daripada sebaliknya sebagai pelayan publik (masyarakat)”.

Sejalan dengan pendapat ahli tersebut diatas, operasi kepolisian pengamanan Lebaran yang merupakan produk kebijakan seharusnya memberikan yang terbaik pada masyarakat yang dapat dirasakan manfaatnya.

Peranan aparatur Negara masih penting tetapi harus bisa bekerja secara profesional, efektif dan akuntabel dalam melaksanakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang terus menerus menuntut untuk dilayani dan pemerintah menjalankan pemerintahan secara akuntabel.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu fungsi Pemerintahan yang memberikan pelayanan dibidang keamanan dimana menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang:

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan melayani masyarakat.

Polri didalam melaksanakan tugasnya memberikan jasa memelihara keamanan, menegakkan hukum dan juga melayani masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan kerja di lingkungan Polri salah satu bentuknya berupa pelaksanaan operasi kepolisian.

Salah satu Satuan Kerja (Satker) dibawah Polri yang bertugas melakukan operasi Kepolisian adalah Staf Operasi Polri (Sops Polri) yang memiliki tugas pokok:

- a. Sops Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen operasi kepolisian yang berada dibawah Kapolri.
- b. Sops Polri bertugas membantu Kapolri dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pelaksanaan kerjasama kementerian lembaga serta menindak lanjuti pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program khusus pemerintah yang berkaitan dengan Polri.

Masyarakat sangat membutuhkan pelayanan dibidang keamanan dan juga penggunaan anggaran negara secara terbuka dan akuntabel yang dapat diakses dengan mudah sehingga kinerja dari instansi pemerintah yang menggunakan uang masyarakat dapat dipertanggung jawabkan.

Selama ini masyarakat masih sulit melihat atau mengukur kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemberian jasa pemeliharaan keamanan. Untuk itu secara partisipatif masyarakat perlu dilibatkan yang berupa penilaian masukan, kritik yang dapat digunakan umpan balik dalam pembuatan kebijakan, dalam hal ini pelaksanaan operasi kepolisian pengamanan lebaran. Selain itu Polri juga harus memberikan tolok ukur ukuran keberhasilan

kinerja dalam pelaksanaan operasi kepolisian pengamanan lebaran yang dicapainya secara terukur, terbuka kepada masyarakat. Gap antara hasil operasi kepolisian pengamanan lebaran dimana disisi lain Polri menyatakan bahwa operasi Ketupat Pengamanan Lebaran dianggap berhasil sedangkan masyarakat menganggap masih banyak keluhan karena banyaknya kemacetan, kecelakaan, korban meninggal dunia sehingga masyarakat menganggap tidak berhasil. Masyarakat tidak mengetahui ukuran apa yang dijadikan pedoman Polri dalam menentukan kinerja operasi kepolisian pengamanan lebaran. Tolok ukur keberhasilan kebijakan operasi kepolisian pengamanan Lebaran perlu disosialisasikan pada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan masukan sebelum/pada saat/setelah operasi kepolisian tersebut dilaksanakan sehingga masyarakat sebagai pengampu kepentingan (Stake holder) merasa dilayani dengan baik. Disisi lain Polri akan mendapatkan masukan apa keinginan masyarakat tentang kebijakan operasi kepolisian pengamanan lebaran sehingga akan terjadi perbaikan kinerja dalam pelaksanaannya dimasa mendatang.

Pendapat yang sama diberikan oleh Deddy (2013 : 39) : “Para pengambil keputusan baik dilembaga legislates maupun eksekutif akan lebih cermat dan lebih cepat melaksanakan program mereka bila mereka juga menerima umpan balik dari pihak lain khususnya rakyat yang berkepentingan.”

Polri harus menerima umpan balik untuk meningkatkan kinerja operasi kepolisian yang dijalankannya.

Penilaian Kinerja telah menjadi tuntutan masyarakat di seluruh dunia dimana menurut Peter Smith : “Performance Indicators have become ubiquitous in the public sector”

Menurut LAN dan BPKP (2001:22) : Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *accountability* yang artinya keadaan untuk dipertanggung jawabkan, keadaan dapat dimintai pertanggung jawaban.

Pendapat senada disampaikan Jabra dan Dwipedi dalam Akuntabilitas Birokrasi Publik (Disertasi Joko Widodo tahun 2006) : “*Accountability is the fundamental prerequisite for preventing the abuse of delegated power is directed toward the achievement of broadly accepted national goals with the greatest possible degree of efficiency, effectiveness, probity and produce*”. Dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa Penyelenggaraan Negara harus berdasarkan pula azas akuntabilitas yakni azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menurut Moore (1997 : 223) yang dimaksud ” kinerja adalah pelaksanaan fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran ketrampilan”.

Menurut Anwar Prabu Mangkunegoro (2000: 67) : Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Amstrong dan Baron (1998 : 15) :” Hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen ”.

Menurut Wibowo (2012 : 2): Kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Upaya perbaikan kinerja sulit dilakukan karena tidak tahu dari mana memulainya dan tidak mengetahui cara dan tolok ukur pengukuran kinerja instansinya. Akibatnya instansi pemerintah hanya menjalankan rencana kegiatan yang dibuatnya dan hanya sekedar menyerap anggaran yang dimintanya tanpa mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan efektif, efisien dan mempunyai akuntabilitas kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima masyarakat. Menurut Blondal (2001:3) seperti yang disampaikan Joko Widodo dalam disertasinya Akuntabilitas Birokrasi Publik : Pemerintah dikatakan akuntabel ketika mereka menunjukkan kepada warganya (citizens):”(1) *What they are getting from the use of public funds in terms of products and services, (2) How these expenditures benefit their lives or the lives of those they care about, and (3) How efficiently and effectively the funds are used, this type of accountability hold government responsible not only for its actions, but also for the result of its action*”. Dengan kata lain masyarakat sangat memerlukan keterbukaan dari organisasi pemerintah tentang bagaimana anggaran dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, apa hasilnya dan manfaatnya bagi masyarakat atau menurut Islamy (1998 : 15) : Penjelasan secara transparan dan terbuka tadi, masyarakat (publik) menjadi tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh birokrasi publik, berapa besar anggaran yang digunakan dan bagaimana hasil tindakan tadi.

Operasi Kepolisian yang menjadi pembahasan dalam disertasi ini yakni operasi Kepolisian untuk pengamanan lebaran tahun 2016 yang merupakan kebijakan yang diambil Pimpinan Polri sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sebelum/pada saat/setelah lebaran . Tuntutan masyarakat tentang kinerja kebijakan operasi kepolisian pengamanan Lebaran yang ditujukan untuk memberikan kelancaran dan keamanan selama mudik dan pulang Lebaran menarik untuk diteliti dan dibahas dalam disertasi ini. Masyarakat tidak bisa mengukur sejauh mana akuntabilitas kinerja Operasi Kepolisian tersebut karena tidak ada informasi tentang bagaimana operasi tersebut direncanakan dan bagaimana hasilnya. Selain itu anggaran yang digunakan oleh Polri adalah anggaran yang berasal dari masyarakat, untuk itu masyarakat perlu mengetahui sejauh mana anggaran itu digunakan dan bagaimana hasilnya untuk itu diperlukan suatu penelitian ini.

Organisasi yang berfungsi menangani kebijakan operasi pengamanan Lebaran adalah Staf Operasi Kapolri Bidang Operasi disingkat Sops Polri yang merupakan staf dan pembantu Kapolri yang mempunyai tugas sebagai pelaksana manajemen operasi kepolisian perlu untuk mempertanggung-jawabkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat. Akuntabilitas kinerja organisasi Sops Polri dalam menjalankan Operasi Kepolisian harus dapat diukur dengan ukuran tertentu sesuai kaidah pengukuran kinerja yang ada. Untuk itu, perlu adanya penelitian tentang kebijakan operasi kepolisian tersebut, ukuran keberhasilan apa yang digunakan dan bagaimana cara mengukurnya.

Dari latar belakang masalah tersebut perlu dilakukan pendalaman melalui penelitian tentang kebijakan operasi kepolisian pengamanan Lebaran. Riant

mengembangkan definisi bahwa penelitian tentang kebijakan adalah penelitian tentang suatu kebijakan tertentu dengan dimensi penelitian berkenaan dengan rumusan kebijakan, termasuk didalamnya perumusan dan dinamika, implementasi kebijakan termasuk dinamika didalamnya, termasuk didalamnya bagaimana kebijakan dikendalikan, baik dari sisi monitoring, evaluasi maupun pengganjarannya, kinerja kebijakan, termasuk didalamnya dari sejak output atau keluaran atau hasil yang dirasakan atau dinikmati organisasi publik hingga outcome atau impak atau hasil yang dirasakan atau dinikmati oleh publik dan umpan balik kepada organisasi publik dan lingkungan kebijakan, baik lingkungan kebijakan saat perumusan, implementasi maupun pada waktu kebijakan berkinerja (2013 : 49). Sejalan dengan hal tersebut Burhan Bungin (2007;57): ” bahwa masalah masalah kebijakan publik bisa terjadi karena adanya ketidak cocokan antara perumusan tentang kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Berdasarkan teori kebijakan publik itu, orang dapat mengkaji sebuah kebijakan publik di masyarakat dengan melihat apakah kebijakan publik di masyarakatnya sudah sesuai dengan teori yang ada. Jadi apabila sebuah program yang melibatkan publik dilaksanakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan itu sendiri ternyata tidak relevan antara perencanaan , implementasi dan evaluasi, maka hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengapa kondisi itu bisa terjadi. Pertanyaan ini sesungguhnya dapat menghasilkan berbagai topik dan masalah penelitian yang menarik untuk diangkat sebagai masalah penelitian khususnya penelitian kebijakan publik ”.

1.2. Rumusan Masalah.

Merujuk pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana proses kebijakan operasi kepolisian pengamanan Lebaran tahun 2016 dibuat dan dilaksanakan Sops Polri dalam merespon keinginan masyarakat untuk dapat melaksanakan mudik dan balik Lebaran secara lancar aman dan tertib?
- b. Faktor faktor apa sajakah yang menghambat organisasi Satuan Tugas Pengamanan Lebaran dalam mewujudkan kinerja kebijakan operasi kepolisian pengamanan Lebaran agar bermanfaat bagi masyarakat?.
- c. Model evaluasi kebijakan seperti apakah yang cocok untuk mendukung pelaksanaan operasi pengamanan Lebaran yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan mengevaluasi permasalahan bagaimana proses pembuatan kebijakan operasi, pelaksanaan dan hasil operasi kepolisian pengamanan Lebaran 2016 dilakukan dalam rangka merespon keinginan masyarakat untuk melaksanakan lebaran secara lancar, aman dan tertib.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor penyebab kendala dalam organisasi satuan tugas operasi kepolisian pengamanan Lebaran dalam melaksanakan operasi kepolisian.

- c. Memberikan masukan cara pembuatan kinerja suatu operasi kepolisian pengamanan Lebaran melalui pembuatan Target operasi yang bisa diukur keberhasilannya dan dapat diterima masyarakat.
- d. Membuat model evaluasi kebijakan yang sesuai untuk operasi kepolisian pengamanan Lebaran yang secara rutin tiap tahun dilaksanakan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis sadar bahwa hasil dari penelitian ini harus bermanfaat baik bagi masyarakat, institusi Sops Polri maupun penulis sendiri dalam rangka pengembangan ilmu karena tanpa manfaat maka penelitian tersebut tanpa makna.

Menurut Heru Nugroho (2001 : 53) "Riset tidak akan berarti apa apa kalau hanya melahirkan publikasi dan popularitas peneliti sebagai kelompok strategis. Riset harus mendatangkan transfer pengetahuan atas penelitian".

Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada:

a. Manfaat Praktis :

- 1) Bagi masyarakat akan dapat mengetahui bagaimana penelitian evaluasi kebijakan pengamanan Lebaran dilakukan sehingga diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan operasi kepolisian tersebut.
- 2) Bagi Polri akan mendapatkan masukan positif untuk memperbaiki kinerja kebijakan yang dibuatnya dan juga pelaksanaan operasi kepolisian pengamanan lebaran di masa mendatang sehingga akan dapat bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Bagi Peneliti berikutnya, penelitian ini bermanfaat dalam memberikan informasi tentang penerapan akuntabilitas kinerja pada suatu instansi

pemerintah dalam membuat kebijakan untuk dikembangkan guna penyempurnaannya.

b. Manfaat Teoritis :

- 1) Bagi ilmu Pengetahuan khususnya ilmu Administrasi Negara yang meneliti tentang kebijakan publik seperti operasi kepolisian pengamanan lebaran akan mendapat masukan bagaimana proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan diterapkan pada suatu organisasi yang khusus (organisasi operasi kepolisian pengamanan lebaran) yang waktunya singkat, personelnya beragam harus dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 2) Disisi lain juga dapat digunakan untuk pengembangan konsep akuntabilitas kinerja didalam mengukur keberhasilan kebijakan bagi pengembangan teori akuntabilitas yang dinamikanya saat ini berkembang dan saling melengkapi sehingga bermanfaat bagi ilmu itu sendiri.
